



# **RENCANA KERJA**

## **BAPENDA KAB. BONE**

### **TAHUN 2019**





**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 74 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BONE TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 yang terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan serta memberi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019, maka diperlukan Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemertintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rancana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 97);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 81);
17. Peraturan Bupati Bone Nomor 71 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 71);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode waktu 1 (satu) tahun, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan.

## Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 disusun dengan maksud :

- a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019; dan
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

## Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 disusun dengan sistematika paling sedikit memuat sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan;  
Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;  
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;  
Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;  
Bab V : Penutup

## Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2019, Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 sebagai rujukan penyusunan program dan kegiatan;
- (2) Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 dengan RKPD Tahun 2019.

## Pasal 6

Isi beserta uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
Pada Tanggal 1 Agustus 2018



**Pj. BUPATI BONE,**

**ANDI BAKTI HARUNI**

Diundangkan di Watampone  
Pada tanggal 1 Agustus 2018



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,**

**A. SURYA DARMA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018 NOMOR 74**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	2
1.1	Latar Belakang	2
1.2	Landasan Hukum	3
1.3	Maksud dan Tujuan	5
1.4	Sistematika Penulisan	5
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	7
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis (Renstra) Tabel T-C.29	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tabel T-C.30	18
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone	25
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tabel T-C.31	26
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tabel T-C.32	34
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	35
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2	Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja	35
3.3	Program dan Kegiatan	41
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	43
	Tabel T-C.33	
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	48

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja Perangkat Daerah adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam membangun daerah sebagai turunan dari rencana strategis dalam pembangunan daerah. Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Penyusunan Rencana kerja Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone memuat substansi rencana program dan kegiatan yang disertai dengan target kinerja perangkat daerah Tahun 2019, rencana pendanaan dan sumber pendanaan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 Jo Peraturan Bupati Bone Nomor 90 Tahun 2016 salah satu fungsi dan tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan Pengelolaan Pemungutan Pendapatan Daerah, disamping melaksanakan pemungutan atas beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bone memiliki target untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Dengan demikian untuk mendukung Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan di daerah ini, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam Tahun Anggaran 2019 diharapkan mampu lebih tajam meningkatkan Penerimaan Pendapatan melalui dukungan potensi sumber daya yang ada dengan upaya memaksimalkan pendayagunaan fasilitas pelayanan, efektifitas peraturan daerah, pendekatan kelembagaan / non kelembagaan secara intensif dan pengawasan pelaksanaan pemungutan secara kontinyu.

Untuk mendukung hal tersebut diatas, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 untuk dijadikan acuan di dalam melaksanakan tugas dan fungsi dinas baik dalam mengkoordinasikan seluruh kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah maupun dalam mengelola langsung beberapa Sumber Pendapatan Asli Daerah, agar dapat diperoleh hasil secara optimal sebagai kelanjutan dari berbagai upaya yang telah dilaksanakan dan berhasil dicapai pada tahun – tahun sebelumnya.



## I.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4355 );
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421 ) ;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- h. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 ) ;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ;

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ) ;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 ;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 ) ;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 09 tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2018 ( Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 8 ) ;
- w. Peraturan Bupati Bone Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Bone T.A 2018 .

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2019 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melakukan tugas dan fungsinya selama 1 (satu) tahun kedepan.
2. Memudahkan aparatur dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan, program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target – target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP);
- c. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e. Untuk menjamin tercapainya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang – Bidang pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone

### 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2019 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **Bab 1   Pendahuluan**

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

#### **Bab 2   Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Menyajikan uraian tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun sebelumnya dan capaian kinerja berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan, isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, beserta review terhadap Rancangan Awal RKPD.

#### **Bab 3   Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Memuat rumusan tentang Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran beserta Gambaran Umum Program dan Kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

#### **Bab 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Menyajikan gambaran Rencana Kerja Perangkat Daerah secara rinci tentang Program dan Kegiatan, Lokasi, Kelompok Sasaran beserta Pendanaan yang akan dilaksanakan pada tahun perencanaan.

#### **Bab 6 Penutup**

Menyajikan kesimpulan terkait catatan penting yang perlu menjadi perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut serta harapan atas Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Tahun Perencanaan.

## BAB II

### HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Rencana Strategis ( Renstra )

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Program / Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 menggambarkan tentang perkembangan capaian Program / Kegiatan yang berkaitan di setiap bidang terkait, yaitu Bidang Perencanaan dan Pengendalian Operasional (P2O), Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Pembukuan dan Pelaporan, dan Sekretariat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017, Untuk menunjang tugas pokok, Program dan kegiatannya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone mendapat alokasi Dana yang telah ditetapkan dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 14,603,195,800,00 (Empat Belas Milyar Enam Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 6,803,195,800,00 ( Enam Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7,800,000,000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah), keseluruhan Belanja Langsung dialokasikan secara efisien dalam pelaksanaan 7 Program yang terdiri dari 30 Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut :

- 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1,029,558,000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,020,770,947,00 atau 99,15 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.**

Program ini didukung dengan kegiatan :

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran dengan capaian yaitu, penyediaan dana pembayaran telepon, penambahan daya listrik dan Penyambungan Listrik.
- 2) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dengan capaian terlaksananya penatausahaan dan pengelolaan administrasi
- 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan dengan capaian peningkatan wawasan aparatur untuk wacana dan informasi aktual.
- 5) Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah dengan capaian terlaksananya konsultasi dan koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- 6) Pelaksanaan Administrasi Perkantoran dengan capaian kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 907,050,000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 895,323,153.00 atau 98,70 % dan realisasi fisik sebesar 100 % dengan kegiatan sebagai berikut :**

- 1) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, yaitu kendaraan roda empat sebanyak 1 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 3 unit dengan capaian lancarnya operasional kegiatan pengelolaan pendapatan daerah.
- 2) Pengadaan Perlengkapan gedung Kantor, yaitu almari, Filling Kabinet, AC 2 PK, Vacuum Cleaner, Perforasi, Papan Nama Kantor dengan capaian meningkatnya dan tersedianya perlengkapan gedung perkantoran.
- 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, yaitu Komputer Note Book, Printer, hardisk, kompor gas, Piring/gelas, Peralatan dapur lainnya, Proyektor, Senter, mesin rumput dan gerobak dengan capaian meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran.
- 4) Pengadaan mebeuler, antara lain meja kerja, kursi kerja dan Rak dengan capaian tersedianya Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Kantor.
- 5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, yaitu pemeliharaan gedung Pelayanan PBB dan Ruang Pengelola pasar dengan capaian meningkatnya kenyamanan fasilitas gedung kantor.
- 6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, yaitu belanja jasa service kendaraan roda empat, belanja penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan dua, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas dan belanja surat tanda nomor kendaraan, dengan capaian terpeliharanya kendaraan dinas pegawai untuk kelancaran operasional pengelolaan pendapatan daerah
- 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor, yaitu pemeliharaan Komputer PC 10 unit, Note Book sebanyak 10 unit dan pemeliharaan AC 14 unit, dengan capaian terpeliharanya perlengkapan kantor.

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

1. Pendidikan dan pelatihan formal, dengan alokasi dana Rp. 265.000.000,00 terealisasi Rp. 261.541.821,00 .Adapun target aparatur yang mengikuti kursus singkat / pelatihan dan bimtek telah terlampaui dengan diikuti peserta 50 orang aparat dari target 25 orang aparat atau sebesar 200 % . Adapun kursus singkat/ pelatihan dan bimbingan teknis yang diikuti adalah sebagai berikut :
  - a. Bimtek Laporan Keuangan sebanyak 3 orang
  - b. Bimtek Penerapan Standar Akuntansi sebanyak 1 Orang .
  - c. Bimtek Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah sebanyak 1 orang .
  - d. Bimtek Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah sebanyak 2 Orang.



- e. Bimbingan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah sebanyak 30 Orang.
- f. Pelatihan audit internal ISO sebanyak 13 Orang.

**4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50,000,000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 49,900,000,00 atau 99,80 % atau realisasi fisik sebesar 100 %, dengan kegiatan :**

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

**5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4,380,304,000,00 realisasi anggaran sebesar Rp. 4,140,812,896.00 atau 94,53 % atau realisasi fisik sebesar 100 %, dengan kegiatan :**

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber – sumber Pendapatan Daerah, dengan capaian terealisasinya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 267,173,137,100,00 yang dapat dicapai sebesar Rp. 279,939,142,250,46 atau 104,78 % dari penerimaan 10 jenis pajak daerah, 20 jenis retribusi daerah, 2 jenis penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan 10 jenis penerimaan lain – lain PAD yang sah.
2. Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan terciptanya administrasi pengelolaan PBB dengan target jumlah masyarakat yang terlayani dalam pengajuan perbaikan PBB-P2, dan jumlah pencetakan SPPT PBB yang tercetak 600.209 lembar
3. Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah lainnya dengan capaian terealisasinya target Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 36,983,033,600,00 yang dapat dicapai sebesar Rp. 44,726,076,045,25 atau 120,94 % dan Retribusi Daerah dengan target Rp. 12,671,944,000,00 dan terealisasi Rp. 12,795,043,203,00 atau 100,97 %.
4. Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan, dengan capaian terlaksananya pemuktahiran Data PBB-P2 untuk meningkatkan keakuratan Data PBB-P2 pada data SISMIOP yang dapat memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan penerimaan PAD di sector Pajak PBB-P2. Wilayah pemuktahiran data PBB-P2 Tahun 2017 yaitu Kelurahan Kahu, Desa Watangcani dan Desa MattirowaliE Kecamatan Bontocani. Hasil (output) kegiatan terdapat penambahan Obyek Pajak sebesar 2.808 Obyek Pajak dengan nilai ketetapan pajak bertambah sebesar Rp. 47.233.603,-

5. Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian terlaksananya Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang Optimal. Jumlah Obyek Pajak yang telah didata pada Tahun 2017 meliputi Pajak restoran 500 ObyekPajak, Pajak Air Tanah 38 Obyek Pajak, Pajak Hiburan 6 Obyek Pajak, Pajak Hotel 39 Obyek Pajak, Pajak Minerba 450 Obyek Pajak, Pajak reklame 325 Obyek Pajak dan Pajak Sarang Burung Walet 33 Obyek Pajak.
6. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan capaian proses pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berjalan optimal sehingga memberikan kemudahan dalam melakukan penagihan. Pelaksanaan Validasi dilaksanakan secara akurat untuk meminimalisir kebocoran penerimaan PAD, dengan menerbitkan Surat Ketetapan kurang bayar bagi data BPHTB yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Penerimaan BPHTB yang diterima pada Tahun 2017 sebesar Rp.4,840,523,261,25 dari target sebesar Rp. 4,010,000,000,00 atau 120,71 %
7. Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan dengan capaian terealisasinya pajak bumi dan bangunan sebesar Rp. 16,743,531,594,00 dari target Rp. 15,727,789,000,00 Dengan capaian penyediaan biaya jasa administrasi pemungutan bagi Kolektor, Kepala Desa dan Camat selaku pelaksana Penagihan Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Terdapat 600.209 lembar SPPT PBB yang akan ditagih kepada wajib pajak. Capaian akhir dari kegiatan ini adalah terlaksananya penagihan 569.257 lembar SPPT PBB – P2 dengan nilai penerimaan sebesar Rp. 16,554,547,118
8. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian semakin efektifnya pengelolaan administrasi penerimaan PBB-P2
9. Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya dengan capaian semakin efisiennya Penatausahaan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
10. Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga dengan capaian semakin efektifnya Pelaporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga.
11. Penyusunan Perencanaan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya Kegiatan Penyusunan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya terangkum dalam Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu dana sebesar Rp. 22.462.000,-dilaksanakan

selama 12 (dua belas) bulan, terealisasi sebesar Rp. 21.047.750,- terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.414.250,- dengan demikian realisasi keuangan sebesar 93,70 % dan Realisasi Fisik/kegiatan sebesar 100%.

Adapun realisasi pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan pengambilan data objek Pajak / Potensi Pajak dan retribusi di Kecamatan Awangpone, Barebbo, Cina, Dua Boccoe, Kahu, Kajuara, Lappariaja, Mare, Patimpeng, Ponredan Kecamatan Tellu Siattinge.  
Data yang telah diperoleh dikoordinasikan dengan Bidang Pendaftaran dan Pendataan serta Bidang Penagihan.
2. Rapat penyusunan rencana penerimaan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD 2017 dan prediksi penerimaan Pendapatan Daerah Tahun 2018 dilaksanakan pada Tanggal 16 Februari 2017 di Kantor Bapenda Kab. Bone yang dihadiri oleh 17 SKPD Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).
12. Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan capaian data yang terdapat pada aplikasi SISMIOP akurat. Pencetakan SPPT, STTS dan DHKP dilaksanakan dengan optimal , jumlah SPPT diterbitkan sebanyak 599.375 Lembar dan proses pendistribusian meliputi 44 kelurahan dan 328 Desa.

**6. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan alokasi anggaran Rp. 1,053,214,000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 1,051,614,000,00 atau 99,85 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan :**

1. Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk, dengan capaian terlaksananya rehabilitasi 16 Pasar yaitu Pasar Timurung Kec. Ajangale, Pasar Waetuo Kec. T.R. Timur, Pasar Parippung Kec. Barebbo, Pasar Uloe Kec. Dua Boccoe, Pasar Panyili Kec. Dua Boccoe, Pasar Sailong Kec. Dua Boccoe, Pasar Ujung Kec. Dua Boccoe, Pasar Bulumpare Kec. Lappariaja, Pasar Bajoe Kec. T.R. Timur, Pasar Lonrong Kec. Ponre, Pasar Inp. Kading Kec. Barebbo, Pasar Inp. Bengo Kec. Bengo, Pasar Tappale Kec. Libureng, Pasar Kadai Kec. Mare, Pasar Maradda Kec. Kahu dan Pasar Lalebata Kec. Lamuru.
2. Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang dengan capaian terlaksananya penataan 16 Pasar yaitu Pasar Timurung Kec. Ajangale, Pasar Waetuo Kec. T.R. Timur, Pasar Parippung Kec. Barebbo, Pasar Uloe Kec. Dua Boccoe, Pasar Panyili Kec. Dua Boccoe, Pasar Sailong Kec. Dua Boccoe, Pasar Ujung Kec. Dua Boccoe, Pasar Bulumpare Kec. Lappariaja, Pasar Bajoe Kec. T.R. Timur, Pasar Lonrong Kec. Ponre, Pasar Inp. Kading Kec. Barebbo, Pasar Inp. Bengo

Kec. Bengo, Pasar Tappale Kec. Libureng, Pasar Kadai Kec. Mare, Pasar Maradda Kec. Kahu dan Pasar Lalebata Kec. Lamuru.

**7. Program Penataan Peraturan Perundang – undangan, dengan alokasi anggaran Rp.114,874,000,00 realisasi keuangan sebesar Rp. 109,365,643,00 atau 95,21 % dan realisasi fisik sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan :**

1. Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan capaian adalah sebagai berikut :

Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terangkum dalam Program Penataan PeraturanPerundang – Undangan dengan Pagu Dana Rp. 114.874.000,- dilaksanakan selama 12 (duabelas) bulan,terrealisasi sebesar Rp. 109.365.649,- terdapat sisa anggaran sebesarRp. 5.508.351,- dengan demikian realisasi keuangan sebesar 95,21 % danRealisasiFisik/kegiatan sebesar 100%.

**- Sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran.**

Sosialisasi kepada para Bendahara Pengeluaran telah dilaksanakan pada Tanggal 7 Maret 2016, di Hotel Novena yang diikuti oleh 69 orang peserta yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Kecamatan.

Materi yang diberikan kepada peserta berupa penjelasan tentang kebijakan pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran atas pembelanjaan sewa tempat dan pembelanjaan makanan dan minuman pada kegiatan masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemungutan Pajak Restoran ini dipungut melalui Bendahara Pengeluaran. Peserta sangat antusias mengikuti acara dengan mengajukan pertanyaan.

**- Sosialisasi melalui media massa/ media cetak.**

Sosialisasi melalui media massa/media cetak dilaksanakan dengan memasang iklan Himbauan Pembayaran Pajak dan Retribusi pada Koran/Media cetak.

**- Sosialisasi kepada masyarakat dan para pejabat di tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan.**

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui pertemuan langsung kepada masyarakat baik di rumah maupun di tempat usaha.

Sosialisasi kepada masyarakat juga dilaksanakan melalui pemasangan informasi pencapaian Penerimaan PAD dan Pengelolaan Pajak dan Retribusi di lokasi Pameran Bone Fair.

Sosialisasi juga dilaksanakan dengan menyebarkan leaflet Pajak Daerah serta memberikan pemahaman kepada pejabat/aparat di 22 Kecamatan dan 5 Desa.

Dari keseluruhan Program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2017, dengan alokasi dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 7.800.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp. 7.529.328.460,00 atau 96,52 % terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 270.671.540,00 yang merupakan penghematan dana dari beberapa program/ kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Bapenda dan pencapaian Renstra s/d Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.29

**Tabel T-C.29.**  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8(7/6)*100	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN									
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon dan listrik	5 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	100,00
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran belanja jasa upah tenaga kerja	5 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	100,00
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	125,00
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Majalah untuk peningkatan wawasan ASN	5 Tahun	3 tahun	27 surat kabar	37 surat kabar	137,04	30 surat kabar	100%	100,00
1	20	01	23	Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumlah terpenuhinya perjalanan dinas rapat korrdinasi	5 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	100,00
1	20	01	24	Pelaksanaan Adminitrasi Perkantoran	Jumlah penyediaan ATK Barang Cetakan & Penggandaan	3 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	166,67
1	20	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	5 Tahun	3 tahun	1 unit	4 unit	400,00	1 unit	8 unit	100,00
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor	5 Tahun	3 tahun	8 jenis	7 jenis	87,50	9 jenis	19 Jenis	100,00



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan gedung kantor	5 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	100,00
1	20	02	10	Pengadnan Mabeleur	Jumlah Mabeleur Kantor	5 Tahun	3 tahun	4 jenis	3 jenis	75,00	4 jenis	10	200,00
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	5 Tahun	3 tahun	1 unit	1 unit	100,00	1 unit	5 tahun	100,00
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama satu tahun anggaran	5 Tahun	3 tahun	33 unit	31 unit	93,94	33 unit	33 unit	100,00
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	5 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	100,00
1	20	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100,00	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100,00
1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Sipil Negara	5 Tahun	2 tahun	75 pasang	125 pasang	166,67	80 pasang	<b>100%</b>	100,00
1	20	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100,00	<b>100%</b>	<b>100%</b>	100,00
1	20	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek, pendidikan dan pelatihan	5 Tahun	3 tahun	27 orang	25 orang	92,59	28 orang	<b>100%</b>	100,00
1	20	26		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>
1	20	26	8	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, KPJP dan Evaluasi Renja	-	-	-	-		3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen
1	20	17		<b>Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase PAD terhadap pencapaian target</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00</b>

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	20	17	19	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah jenis kegiatan Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD	5 Tahun	3 tahun	30 Jenis Pendapatan	30 Jenis Pendapatan	100,00	30 Jenis Pendapatan	30 Jenis Pendapatan	100,00
1	20	17	70	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelayanan Kepada Wajib PBB-P2	3 Tahun	3 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	5 tahun	166,67
1	20	17	71	Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Jenis Kegiatan Penagihan	2 Tahun	2 tahun	1 tahun	1 tahun	100,00	1 tahun	4 tahun	200,00
1	20	17	72	Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Jumlah pemutakhiran data PBB-P2	4 Tahun	3 tahun	10.000 OP	2.808 OP	28,08	11.000 OP	2724 OP	100,00
1	20	17	73	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib pajak daerah & Retribusi Daerah yang dikelola pendataannya secara berkala	2 Tahun	2 tahun	220 WP & WR	220 WP & WR	100,00	320 WP & WR	100%	100,00
1	20	17	74	Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2 Tahun	2 tahun	220 WP & WR	220 WP & WR	100,00	320 WP & WR	100%	100,00
1	20	17	75	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah penerima jasa administrasi pemungutan dan kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB-P2	2 Tahun	2 tahun	17 M	17 M	100,00	18 M	100%	100,00
1	20	17	76	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Jumlah dokumen penerimaan PBB-P2	2 Tahun	2 tahun	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	100%	100,00
1	20	17	77	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah dokumen penerimaan pajak daerah & retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya	2 Tahun	2 tahun	6 dokumen	6 dokumen	100,00	6 dokumen	100%	100,00
1	20	17	78	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Jumlah dokumen Laporan Pendapatan Daerah dan Laporan Pendapatan Benda Berharga	2 Tahun	2 tahun	4 dokumen	4 dokumen	100,00	4 dokumen	100%	100,00
				Penyusunan Perencanaan Penerimaan PAD dan Pendapatan Daerah Lainnya	Jumlah dokumen perencanaan PAD & Pendapatan Daerah lainnya	2 Tahun	2 tahun	2 dokumen	2 dokumen	100,00	2 dokumen	100%	100,00
1	20	17	80	Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	Jumlah dokumen penerbitan dan distribusi SPPT,STTS dan DHKP	2 Tahun	2 tahun	580.000 SPPT	569.257 SPPT	98,15	600.000 SPPT	100%	100,00

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (Tahun 2017)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8(7/6)*100	9	10=( 5+7+9)	11=(10/4)
					PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional								
					Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang / Produk	Jumlah Pemeliharaan Pasar Tradisional	33 pasar	37 pasar	15 pasar	15 pasar	100,00	16 pasar	68 pasar	206,06
					Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang	Jumlah Penertiban Pasar	2 Tahun	2 tahun	20 pasar	16 pasar	80,00	30 pasar	48 pasar	100,00
1	20	26			Program Penataan Peraturan Perundangan	Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah setiap tahun	100%	100%	100%	100%	100,00	100%	100%	100,00
1	20	26	08		Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 Tahun	3 tahun	10 kecamatan	22 kecamatan	220,00	10 kecamatan	100%	100,00

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur Pelaksanaan Pemerintah Daerah di bidang Pendapatan Daerah baik mengkoordinir seluruh kegiatan Penerimaan Daerah maupun dalam mengelola langsung beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah, mendapat dukungan pembiayaan yang secara jelas tercantum dalam APBD Kabupaten Bone.

Tinjauan Evaluasi atas kinerja pelayanan Bapenda Kab. Bone Tahun 2017 dilakukan dengan menghitung persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi Pendapatan Daerah dengan target yang telah ditetapkan dalam APBD Kab. Bone Tahun 2017. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone selaku koordinator Penerimaan Pendapatan Daerah mengkoordinir Penerimaan PAD yang dikelola oleh 17 ( Tujuh Belas ) OPD.

Dari 30 (tiga puluh) Jenis Penerimaan Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017, terdapat 14 (empat belas) jenis yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah yang terdiri dari :

### **a. Sektor Pajak Daerah mengelola sepuluh jenis yaitu:**

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Pajak Sarang Burung Walet
8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
10. Bea Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan

### **b. Sektor Retribusi Daerah mengelola Empat jenis yaitu:**

1. Retribusi Pasar:
  - Pasar Sentral Watampone;
  - Pasar Inpres dan Non Inpres
2. Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
  - Pemakaian Rumah Daerah;
  - Pemakaian BTC.
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Khusus untuk Pendapatan Asli Daerah yang dikelola langsung Pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2017 ditargetkan sebesar

Rp. 39.632.620.600,00 dan berhasil direalisasikan sampai akhir Tahun Anggaran sebesar Rp. 47.126.823.045,25 atau 118,91 %.

Dengan demikian Penerimaan yang dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam Tahun 2017 memberikan kontribusi terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam APBD sebesar 16,84 % atas realisasi Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan.

Adapun capaian Rekapitulasi Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2.2.1 dan capaian Realisasi PAD khusus yang dikelola Bapenda Kab. Bone dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 di bawah ini :

**TABEL 2.2.1**  
**TARGET DAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2016 - TAHUN 2017**

NO	URAIAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%	PENINGKATAN REALISASI	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		NILAI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>177.333.582.070,00</b>	<b>180.156.598.903,17</b>	<b>101,59</b>	<b>267.173.137.100,00</b>	<b>280.478.099.485,46</b>	<b>104,98</b>	<b>100.321.500.582,29</b>	<b>55,69</b>
	PAJAK DAERAH	35.533.033.385,00	37.605.711.246,50	105,83	36.983.033.600,00	44.726.076.045,25	120,94	7.120.364.798,75	18,93
	RETRIBUSI DAERAH	14.317.803.000,00	11.336.148.488,00	79,18	12.671.944.000,00	12.734.571.559,00	100,97	1.458.894.715,00	12,34
	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.216.285.872,00	4.179.816.872,00	99,14	6.364.434.900,00	6.727.965.905,22	105,71	2.548.149.033,22	60,96
	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	123.266.459.813,00	127.034.922.296,67	103,06	211.153.724.600,00	216.289.485.975,99	102,15	88.655.134.799,33	70,26
<b>2</b>	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	<b>1.565.186.413.780,00</b>	<b>1.540.620.696.554,00</b>	<b>98,43</b>	<b>1.555.594.547.000,00</b>	<b>1.512.633.984.416,00</b>	<b>97,24</b>	<b>27.986.712.138,00</b>	<b>1,82</b>
	DANA BAGI HASIL PAJAK/BAGI HASIL BUKAN PAJAK	53.458.237.780,00	52.114.930.328,00	97,49	38.130.058.000,00	31.407.240.349,00	82,37	- 20.707.689.979,00	- 39,73
	DANA ALOKASI UMUM	1.088.618.062.000,00	1.088.618.062.000,00	100,00	1.069.494.543.000,00	1.069.494.543.000,00	100,00	- 19.123.519.000,00	- 1,76
	DANA ALOKASI KHUSUS	423.110.114.000,00	399.887.704.226,00	94,51	447.969.946.000,00	411.732.201.067,00	91,91	11.844.496.841,00	2,96
<b>3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>316.114.466.094,00</b>	<b>321.751.879.398,00</b>	<b>101,78</b>	<b>413.988.168.000,00</b>	<b>408.587.592.759,00</b>	<b>98,70</b>	<b>86.835.713.361,00</b>	<b>26,99</b>
	HIBAH	11.038.190.000,00	11.038.188.960,00	100,00	-	-			
	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI DAN DARI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	70.092.015.916,00	75.918.025.272,00	108,31	81.104.000.000,00	76.881.029.359,00	94,79	963.004.087,00	1,27
	DANA PENYESUAIAN DAN OTONOMI KHUSUS	200.922.535.000,00	202.773.125.000,00	100,92	306.940.168.000,00	306.700.190.600,00	99,92	103.927.065.600,00	51,25
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI PEMERINTAH DAERAH LAINNYA	34.061.725.178,00	32.022.540.166,00	94,01	25.944.000.000,00	25.006.372.800,00	96,39	- 7.016.167.366,00	- 21,91
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.058.634.461.944,00</b>	<b>2.042.529.174.855,17</b>	<b>99,22</b>	<b>2.236.755.852.100,00</b>	<b>2.201.160.719.424,47</b>	<b>98,41</b>	<b>158.631.544.569,30</b>	<b>7,77</b>



**TABEL 2.2.2**  
**TARGET DAN REALISASI PAD YANG DIKELOLA BAPENDA TAHUN 2016 - TAHUN 2017**

NO	URAIAN	TAHUN 2016		%	TAHUN 2017		%	PENINGKATAN REALISASI	
		TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI		NILAI (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	PAJAK HOTEL	203.940.000,00	204.959.795,00	100,50	203.940.000,00	331.093.376,00	162,35	126.133.581,00	61,54
2	PAJAK RESTORAN	689.030.000,00	922.031.549,00	133,82	1.039.030.000,00	2.428.834.859,00	233,76	1.506.803.310,00	163,42
3	PAJAK HIBURAN	181.000.000,00	195.029.559,00	107,75	181.000.000,00	136.431.776,00	75,38	- 58.597.783,00	- 30,05
4	PAJAK REKLAME	416.300.000,00	496.875.200,00	119,36	416.300.000,00	613.437.550,00	147,35	116.562.350,00	23,46
5	PAJAK PENERANGAN JALAN	13.842.336.978,00	15.199.252.193,00	109,80	14.942.337.000,00	18.935.573.944,00	126,72	3.736.321.751,00	24,58
6	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	400.000.000,00	342.818.387,00	85,70	400.000.000,00	583.903.367,00	145,98	241.084.980,00	70,32
7	PAJAK AIR TANAH	52.637.600,00	87.460.031,00	166,16	52.637.600,00	88.846.318,00	168,79	1.386.287,00	1,59
8	PAJAK SARANG BURUNG WALET	10.000.000,00	10.800.000,00	108,00	10.000.000,00	23.900.000,00	239,00	13.100.000,00	121,30
9	PAJAK BUMI & BANGUNAN PERDESAAN & PERKOTAAN	15.727.788.807,00	16.687.970.269,00	106,10	15.727.789.000,00	16.743.531.594,00	106,46	55.561.325,00	0,33
10	BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	4.010.000.000,00	3.458.514.263,50	86,25	4.010.000.000,00	4.840.523.261,25	120,71	1.382.008.997,75	39,96
11	RETRIBUSI PELAYANAN PASAR	2.416.818.000,00	2.152.999.500,00	89,08	2.416.818.000,00	2.200.383.000,00	91,04	47.383.500,00	2,20
12	RETRIBUSI PASAR GROSIR / PERTOKOAN	46.656.000,00	62.160.000,00	133,23	46.656.000,00	68.544.000,00	146,91	6.384.000,00	10,27
13	RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH	171.113.000,00	137.645.000,00	80,44	171.113.000,00	114.020.000,00	66,63	- 23.625.000,00	- 17,16
14	RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR	15.000.000,00	18.493.000,00	123,29	15.000.000,00	17.800.000,00	118,67	- 693.000,00	- 3,75
	JUMLAH	38.182.620.385,00	39.977.008.746,50	104,70	39.632.620.600,00	47.126.823.045,25	118,91	7.149.814.298,75	17,88

Badan Pendapatan Daerah Kab.Bone tidak memiliki indikator kinerja beserta target dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang diatur secara khusus dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada. Namun demikian, terdapat satu Indikator Kinerja Kunci (IKK), yaitu “*Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah*”. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk lima tahun hanya mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023, dimana capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dinyatakan dalam 2 sasaran strategis & 2 indikator kerjanya.

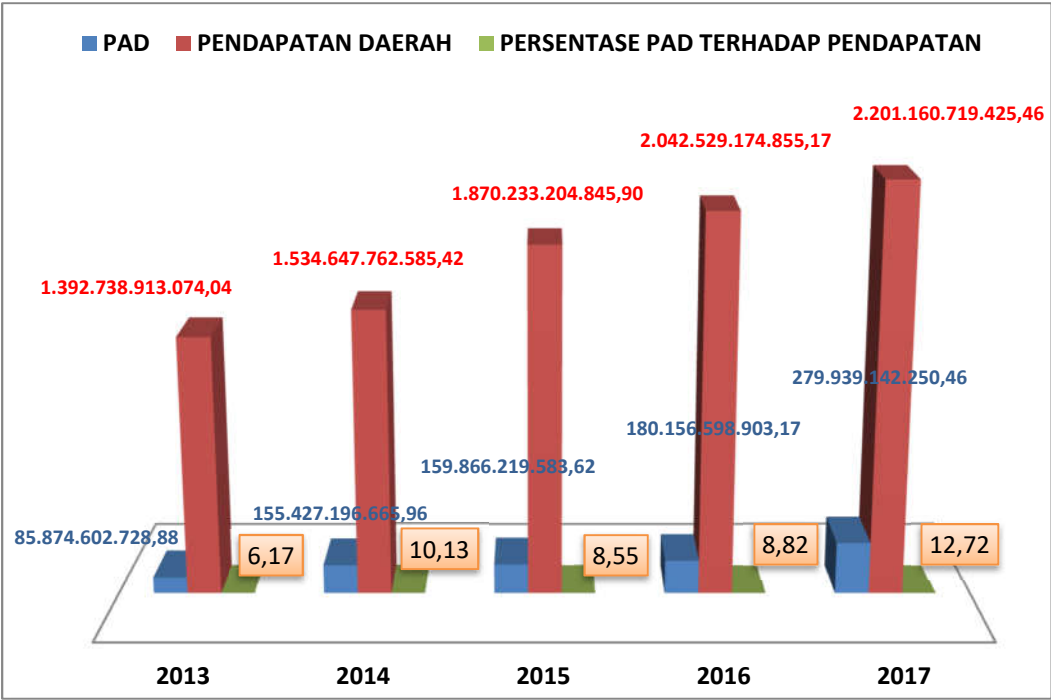
Kedua indikator kinerja dari sasaran strategis tersebut dinyatakan sebagai Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar dalam pengukuran dan penilaian capaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, dengan tolok ukur kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.2.3  
IKU Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	%	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Realisasi PAD Thn ini} - \text{Realisasi PAD Tahun lalu}}{\text{Realisasi PAD Tahun Lalu}} \times 100$ <p>Sumber Data : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah</p>
Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	<p>Formulasi Perhitungan :</p> $\frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Jumlah Pendapatan Daerah}} \times 100$ <p>Sumber Data : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah</p>

Salah satu Indikator Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone adalah Persentase PAD terhadap pendapatan, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah . Hasil kinerja terhadap indikator tersebut sebagaimana Tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.4**  
**Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**  
**Tahun 2013-2017**



Sebagaimana tabel diatas nampak bahwa persentase penerimaan PAD terhadap jumlah Pendapatan Daerah mulai Tahun 2013 memperlihatkan trend yang meningkat, yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja setiap tahun dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bone selama kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017.

Tahun 2015 nampak ada penurunan kontribusi sebesar 1,58 % dibanding Tahun 2014, disisi lain terdapat peningkatan PAD sebesar Rp. 4.439.022.917.66,- dari Tahun 2014. Hal ini disebabkan karena bertambahnya jumlah penerimaan Pendapatan Daerah dari penerimaan transfer Dana Desa dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan mulai Tahun 2015.

Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah Pendapatan Daerah Kabupaten Bone masih dibawah 20 % (dua puluh persen) hal ini disebabkan karena sektor penyumbang terbesar pada PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Kab. Bone adalah sektor pertanian. Dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sektor hasil pertanian bukan merupakan objek secara langsung dalam pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Adapun capaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana Tabel di bawah ini :

**Tabel T-C.30**

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Keterangan
				Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah</b>												
1	Persentase Rata-Rata Kenaikan PAD	-	-	50,66	0,01	0,64	5,90	55,69	0,01	0,64	5,90	
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah</b>												
2	Persentase PAD terhadap pendapatan Daerah	-	-	11,94	9,51	9,03	9,05	12,74	9,52	9,03	9,05	

Dari Tabel tersebut di atas, dapat dilihat pada Tahun Anggaran 2017 Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap realisasi Pendapatan Daerah APBD mencapai angka 12,74 % hal ini dipicu dengan adanya kebijakan pemerintah pusat menempatkan Dana Transfer Bos ( Bantuan Operasional Sekolah ) masuk sebagai komponen Lain-Lain PAD yang sah, namun sesuai Permendagri No.33 Tahun 2017 Dana Bos ini kembali dianggarkan pada Komponen Dana Transfer sehingga mempengaruhi Rasio PAD terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bone, Badan Pendapatan Daerah merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pendapatan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagaimana Pasal 4 ayat 2 Peraturan Bupati Kabupaten Bone Nomor 90 Tahun 2016 yaitu

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
2. Pelaksanaan kebijakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan daerah ;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Kontribusi/Rasio PAD terhadap APBD masih rendah
2. Tingkat pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran pajak belum memadai.
3. Instrumen Perpajakan yang digunakan dalam penindakan pelanggaran ketentuan perpajakan belum memadai/tersedia seperti Pemeriksa Pajak, Juru Sita Pajak, dan Penyidik Perpajakan.

#### **Kekuatan :**

1. aturan tingkat daerah cukup memadai dan jelas pelaksanaannya;
2. potensi obyek pajak yang belum tergali cukup banyak;
3. jumlah SDM Bapenda memadai.

**Tantangan :**

1. masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
2. belum optimalnya penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan perpajakan;
3. inefisiensi dalam pemungutan retribusi terutama yang *uncontrolable* oleh Bapenda.
4. luas wilayah kabupaten Bone menyebar sehingga kesulitan untuk mengcover obyek pajak sehingga biaya pelayanan lebih besar dibandingkan nilai obyek pajak;
5. peraturan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah.

**Peluang :**

1. potensi obyek pajak yang masih banyak dan belum tergali;
2. ada kesempatan pembiayaan dari pemerintah pusat untuk perbaikan infrastruktur pelayanan pasar dan pelabuhan rakyat sebagai pendukung pungutan retribusi;

Isu penting dalam rencana penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2019 yaitu melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah bidang Pendapatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

- b. Meningkatnya Realisasi Pendapatan Asli Daerah ;
- c. Meningkatnya kualitas administrasi dan teknologi informasi, manajemen pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.

**2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Proses review terhadap rancangan awal RKPD dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2019 dilakukan dengan menbandingkan antara Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah dengan Hasil Analisis Kebutuhan yang diperoleh dari evaluasi pelaksanaan renja tahun sebelumnya dan capaian target renstra, analisis kinerja pelayanan, potensi permasalahan dan hambatan, hingga isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Proses ini diperlukan untuk lebih mempertajam rumusan program/kegiatan beserta outcome/outputnya agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien, ekonomis dan relevan dengan perkembangan isu-isu strategis terkait pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Keselarasan antara dokumen perencanaan secara vertikal antara Renja Perangkat Daerah dan RKPD Kabupaten juga menjadi tujuan dari proses review ini, dimana proses ini dapat memberikan jaminan yang memadai terkait konsistensi perencanaan terkait perumusan

program/kegiatan yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada tahun berikutnya.

Hal-hal yang menjadi catatan penting dari proses review ini, mencakup rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya. Perbedaan-perbedaan yang ditemukan (terkait hal-hal tersebut di atas) dalam proses ini harus dijelaskan untuk hasil perencanaan yang lebih baik, berorientasi pada pencapaian hasil yang terukur dan tepat sasaran.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kab. Bone Tahun 2019 berdasarkan perbandingan terhadap hasil analisis kebutuhan terkait rumusan program/kegiatan, lokasi, indikator kinerja (outcome/output) beserta targetnya, dan juga kebutuhan dana/pagu indikatif untuk pelaksanaannya, dapat dilihat pada tabel T-C.31 di bawah ini:

**Tabel T-C.31.**  
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : Badan Pendapatan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>1</b>	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Kantor Bapenda	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran	<b>100%</b>	<b>82.850.000</b>	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>	Kantor Bapenda	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran	<b>100%</b>	<b>82.850.000</b>
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA yang tersusun	3 dokumen	46.850.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA yang tersusun	3 dokumen	46.850.000
	Promosi dan Pameran Pembangunan	Kantor Bapenda	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan	1 Kegiatan	36.000.000	Promosi dan Pameran Pembangunan	Kab. Bone	Jumlah Pelaksanaan pameran pembangunan	1 Kegiatan	36.000.000
<b>2</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kantor Bapenda	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	<b>100%</b>	<b>891.453.000</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	Kantor Bapenda	Cakupan ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	<b>100%</b>	<b>891.453.000</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Bapenda	Jumlah pembayaran telepon & listrik	12 Paket	55.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kantor Bapenda	Jumlah pembayaran telepon & listrik	12 Paket	55.000.000
	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kantor Bapenda	Jumlah pembayaran Jasa Upah Tenaga Kerja	12 Paket	362.568.000	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kantor Bapenda	Jumlah pembayaran Jasa Upah Tenaga Kerja	12 Paket	362.568.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kantor Bapenda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	8.895.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Kantor Bapenda	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	15 jenis	8.895.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Kantor Bapenda	Jumlah surat kabar & majalah Untuk peningkatan wawasan ASN	12 paket	40.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Kantor Bapenda	Jumlah surat kabar & majalah Untuk peningkatan wawasan ASN	12 paket	40.000.000



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah	Kantor Bapenda	Jumlah terpenuhinya perjalanan dinas rapat koordinasi	130 Kegiatan	195.000.000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah & luar daerah	Kantor Bapenda	Jumlah terpenuhinya perjalanan dinas rapat koordinasi	130 Kegiatan	195.000.000
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kantor Bapenda	Jumlah penyediaan ATK, Barang cetakan dan penggandaan	12 paket	229.990.000	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Kantor Bapenda	Jumlah penyediaan ATK, Barang cetakan dan penggandaan	12 paket	229.990.000
3	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kantor Bapenda</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>832.805.000</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Kantor Bapenda</b>	<b>Cakupan realisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran</b>	<b>100%</b>	<b>832.805.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Bapenda	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit	430.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Kantor Bapenda	Jumlah kendaraan dinas/operasional	1 unit	430.000.000
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	33.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah penyediaan perlengkapan gedung kantor	4 jenis	33.000.000
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	4 jenis	61.500.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah Penyediaan Peralatan Gedung Kantor	4 jenis	61.500.000
	Pengadaan Mabeleur	Kantor Bapenda	Jumlah Mabeleur Kantor	27 Buah	27.500.000	Pengadaan Mabeleur	Kantor Bapenda	Jumlah Mabeleur Kantor	27 Buah	27.500.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Paket	125.805.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	3 Paket	125.805.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama satu tahun anggaran	35 Unit	135.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Bapenda	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama satu tahun anggaran	35 Unit	135.000.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	49 Unit	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	Jumlah penyediaan pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor	49 Unit	20.000.000
4	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan realisasi pengadaam kebutuhan penunjang disiplin aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		40.500.000	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Cakupan realisasi pengadaam kebutuhan penunjang disiplin aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran		40.500.000
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor Bapenda	Jumlah Pakaian Aparatur Sipil Negara	150 Pasang	40.500.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Kantor Bapenda	Jumlah Pakaian Aparatur Sipil Negara	150 Pasang	40.500.000
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan		230.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan		230.000.000
	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kantor Bapenda	Jumlah Aparat Yang Mengikuti Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan	12 paket	230.000.000	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Kantor Bapenda	Jumlah Aparat Yang Mengikuti Bimtek, Pendidikan dan Pelatihan	12 paket	230.000.000
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran		9.821.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran		9.821.000
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD dan Evaluasi Renja (Rencana Kerja)	3 dokumen	9.821.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen LAKIP, LPPD dan Evaluasi Renja (Rencana Kerja)	3 dokumen	9.821.000
7	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target		4.145.591.000	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target		4.145.591.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Insentififikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah jenis kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	3 Kegiatan	698.327.000	Insentififikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah jenis kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD	3 Kegiatan	698.327.000
	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah Pelayanan Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	6 Pelayanan	485.370.000	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah Pelayanan Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	6 Pelayanan	485.370.000
	Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	27 Kecamatan di Kabupaten Bone	Jumlah Jenis Kegiatan Penagihan	8 JenisPajak Daerah & Retribusi Daerah	100.074.000	Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	27 Kecamatan di Kabupaten Bone	Jumlah Jenis Kegiatan Penagihan	8 JenisPajak Daerah & Retribusi Daerah	100.074.000
	Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Kec. Cina Kec. Tellu Siattinge Kec. Tanete Riattang	Jumlah Pemutakhiran Data PBB-P2	2 Paket	426.789.000	Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dab Bangunan Perdesaan Perkotaan	Kec. Cina Kec. Tellu Siattinge Kec. Tanete Riattang	Jumlah Pemutakhiran Data PBB-P2	2 Paket	426.789.000
	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah wajib pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola pendataannya secara berkala	750 WP & WR	92.835.000	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah wajib pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola pendataannya secara berkala	750 WP & WR	92.835.000
	Penerbitan dan Distrbusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Kantor Bapenda	Jumlah dokumen Pener bitan & distribusi keteta pan pajak daerah & retri busi daerah	5 Dokumen	121.692.000	Penerbitan dan Distrbusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi daerah	Kantor Bapenda	Jumlah dokumen Pener bitan & distribusi keteta pan pajak daerah & retri busi daerah	5 Dokumen	121.692.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah penerima Jasa administrasi pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB-P2	504 OB	1.267.954.000	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah penerima Jasa administrasi pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB-P2	504 OB	1.267.954.000
	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2	4 Dokumen	79.618.000	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2	4 Dokumen	79.618.000
	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	6 Dokumen	55.643.000	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Kantor Bapenda	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	6 Dokumen	55.643.000
	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Kantor Bapenda	Jumlah dokumen laporan pendapatan daerah dan pengelolaan benda berharga	10 Dokumen	366.122.000	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Kantor Bapenda	Jumlah dokumen laporan pendapatan daerah dan pengelolaan benda berharga	10 Dokumen	366.122.000
	Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah dokumen Penerbitan dan Distribusi SPPT, STTS dan DHKP	3 Dokumen	305.196.000	Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	Jumlah dokumen Penerbitan dan Distribusi SPPT, STTS dan DHKP	3 Dokumen	305.196.000
	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	27 Kecamatan se Kabupaten Bone	Jumlah Pasar yang dioptimalkan pemungutan retribusinya	83 Pasar	145.971.000	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	27 Kecamatan se Kabupaten Bone	Jumlah Pasar yang dioptimalkan pemungutan retribusinya	83 Pasar	145.971.000
8	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Kenaikan objek pajak daerah dan retribusi daerah		166.980.000	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		Persentase Kenaikan objek pajak daerah dan retribusi daerah		166.980.000

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana Rp.000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kecamatan TaneteRiattang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pajak daerah dan Retribusi Daerah	150 Orang	166.980.000	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kecamatan TaneteRiattang	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan pajak daerah dan Retribusi Daerah	150 Orang	166.980.000

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Sesuai amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional serta aturan-aturan pelaksanaanya, rencana program dan kegiatan dititik beratkan dari usulan masyarakat baik yang diperoleh pada saat kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat melalui mekanisme Musrembang maupun yang diperoleh dari pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ikut pada saat kegiatan musrembang, maka diperoleh usulan program dan kegiatan untuk Tahun 2019 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone.

Adapun Usulan program dan kegiatan Hasil Musrembang Tahun 2019 sebagaimana pada Tabel di bawah ini :

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2019 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah ➤ Pemutakhiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	➤ Kec. Cina - Padangloang ➤Kec. Tellu Siattinge - Pongka - Pada idi ➤Kec. T. Riattang - Macanang - Jeppe'E	Presentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target	2 paket	Daftar Usulan hasil Musrenbang  Pokok Pikiran DPRD

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019**

##### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja ( Renja ) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 adalah Dokumen perencanaan yang substansi penyusunannya merupakan penjabaran Visi, Misi Arah Pembangunan Daerah Kabupaten Bone dan merupakan koridor dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunannya dilakukan secara terencana, sistimatis yang didasarkan pada kondisi, potensi proyeksi sesuai kebutuhan.

Telaahan terhadap kebijakan ini dimaksudkan untuk mengetahui arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Tema Pembangunan Daerah Kabupaten Bone 2020 yaitu “ Akselerasi Pembangunan yang Mandiri dan Berdaya Saing” yang mengacu pada kebijakan Pembangunan Nasional, tentunya akan menjadi acuan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Prioritas Pembangunan Tahun 2020 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak yang implementasinya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone dengan melaksanakan optimalisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui program dan kegiatan yang mengarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran.

##### **3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.**

Visi dan Misi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2019-2023 sebagaimana tertuang dalam rancangan awal RKPD Kab. Bone Tahun 2019 yang ditetapkan sebagai konsep awal (rancangan teknokratis) dalam masa transisi Pemerintahan Kab. Bone dari Periode Lima Tahun sebelumnya (Tahun 2013-2018) menuju Periode Lima Tahun selanjutnya (Tahun 2018-2023) adalah sebagai berikut :

Visi Pemerintah Kab. Bone Tahun 2018-2023 (rancangan teknokratis), yaitu :

***Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera***

Salah satu misi Pemerintah Kab. Bone pada Tahun 2018-2023 yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone, yaitu sebagai berikut :

***Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)***

Sesuai misi tersebut di atas dan sejalan dengan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan rumusan sasaran target kinerja rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2018-2023, maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone untuk Tahun 2019.

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Tahun 2019, yaitu sebagai berikut :

**Tujuan 1** : *Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah.*

Dengan **Sasaran** :

- 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.*
- 2. Meningkatnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.*

**Tujuan 2** : *Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah*

Dengan **Sasaran** :

- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendapatan Daerah*

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka kegiatan dalam Tahun Anggaran 2019 lebih lanjut dijabarkan sesuai tugas dan fungsi yang ada serta disesuaikan dengan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone sebagai berikut :

**A. BIDANG UMUM**

1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta program ;
2. Penyusunan Rencana Strategis ( RENSTRA ) ;
3. Pengoordinasian penyusunan rencana anggaran, program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah ;
4. Pelaksanaan pembinaan urusan umum dan administrasi kepegawaian ;
5. Pelaksanaan urusan keuangan dan penyusunan neraca ;
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah ;
7. Melaksanakan Peningkatan Pengetahuan aparat Bapenda .



## **B. BIDANG PERENCANAAN**

1. Meninjau dan melakukan Perubahan Peraturan Daerah yang menyangkut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, utamanya Peraturan Daerah yang usianya di atas 3 (tiga) tahun maupun Perubahan Peraturan Daerah yang belum mencapai 3 (tiga) tahun tetapi situasi dan kondisi objek / subjek memungkinkan untuk diadakan perubahan;
2. Menyusun Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak sebagai dasar Pengenaan Pajak ;
3. Menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang baru sebagai usaha Ekstensifikasi Pendapatan Daerah ;
4. Melaksanakan Rapat minimal sekali setiap triwulan dengan satuan kerja perangkat daerah untuk mengevaluasi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD ;
5. Melaksanakan evaluasi, penyempurnaan sistim, prosedur dan mekanisme kerja dalam pelaksanaan manual Pendapatan Daerah ;
6. Memberikan Penyuluhan kepada Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Mengadakan Evaluasi Langsung pada Pelaksana Pemungutan dalam Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone dengan maksud :
  - a. Pemantapan Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Lain – lain Pendapatan Daerah;
  - b. Mengevaluasi keadaan fasilitas penyelenggaraan (Sarana dan Prasarana).
8. Memberikan target operasional Pelaksana Pemungutan dengan maksud mengamankan Target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone ;
9. Melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis bagi para Petugas Pengelola PBB – P2 dan Para Koordinator Pemungut, Pembantu Bendahara Khusus Penerima serta unsur yang ada kaitannya dengan Pengelolaan Pendapatan Daerah .
10. Melaksanakan Intensifikasi dan Pengendalian atas pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

### **C. BIDANG PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PENETAPAN**

1. Mengadakan pendataan objek / subjek Pajak Hotel, Restoran, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet dan BPHTB serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Tambang C) serta objek PBB – P2 ;
2. Mengadakan pendataan objek / subjek Golongan Badan Usaha yang beroperasi dalam wilayah Kabupaten Bone ;
3. Menindak lanjuti SPPT PBB yang bermasalah seperti Double Penetapan, Pengenaan Pajak yang tidak sesuai dengan NJOP dan Penetapan PBB fiktif dengan jalan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Watampone dan melakukan Intensifikasi Penagihan PBB tahun sebelumnya (Tunggakan);
4. Melakukan perubahan data melalui Sistim Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP);
5. Memberikan penghargaan kepada para Camat, Kepala Desa dan Lurah yang berprestasi dalam Pengelolaan PBB;

### **D. BIDANG PENAGIHAN**

1. Mencari data sekaligus melaksanakan Penagihan atas Hak Pemerintah Kabupaten Bone dari Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak ;
2. Akan mengembangkan Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga ;
3. Melaksanakan penyerahan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan kepada para Camat, Kepala Desa / Lurah ;
4. Melaksanakan Penagihan sementara dan penagihan piutang Pajak dan Retribusi Daerah ;
5. Mengadakan uji petik penerimaan Retribusi Pasar dan Retribusi Parkir;
6. Membentuk Tim Inventarisasi dan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan.

### **E. BIDANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**

1. Melaksanakan Pemeriksaan rutin pada pelaksana pemungutan di lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;
2. Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pendapatan Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola PAD;
3. Melakukan Bimbingan Tekhnis pada aparat pelaksana Pengelola Pendapatan Daerah;

4. Melakukan Pengendalian / Penelitian Dokumen hasil pengelolaan Pendapatan Daerah yang dipungut oleh Pelaksana Tekhnis dalam lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone;
5. Monitoring, pengawasan internal dan Mengevaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya;
6. Melakukan Koordinasi dan Konsultasi dengan Instansi Pengawasan Intern / Ekstern dalam rangka pemutakhiran data hasil tindak lanjut ;
7. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Lain terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### **F. BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN**

1. Perencanaan kebijakan teknis pengelolaan pembukuan, penerimaan dan pelaporan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta poengelolaan benda berharga ;
2. Pencatatan penetapan dan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya ;
3. Penyiapan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak Daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya secara berkala ;
4. Perencanaan kebutuhan pemakaian benda berharga ;
5. Pembuatan Laporan persediaan benda berharga secara berkala ;
6. Penyajian data dan informasi tentang penerimaan Pendapatan Daerah.

**Tabel 3***Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah beserta Program Tahun 2019 – Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone*

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TUJUAN (TAHUN 2023)	TARGET SASARAN (TAHUN 2019)	PROGRAM
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Persentase Rata-Rata Kenaikan Pendapatan Asli Daerah	15,56	0,64	➤ Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatnya Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	10,00	9,03	➤ Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
2	Meningkatkan Akuntabilitas Organisasi Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Pendapatan Daerah	Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP	A	B	➤ Program Pelayanan Adm. Perkantoran ➤ Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur ➤ Program Peningkatan Disiplin Aparatur ➤ Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ➤ Program Penunjang Pemerintahan Umum ➤ Program Peningkatan & Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & keuangan

### 3.3 Program dan Kegiatan

Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan. Adapun rincian Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Pemerintahan Umum
  - 1). Penyusunan Rencana Perangkat Daerah
  - 2). Penyelenggaraan Pameran Investasi
2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - 1). Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
  - 2). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - 3). Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
  - 4). Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan
  - 5). Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah
  - 6). Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - 1). Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional
  - 2). Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
  - 3). Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
  - 4). Pengadaan Mabeleur
  - 5). Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor
  - 6). Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional
  - 7). Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - 1). Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 1). Pendidikan Dan Pelatihan Formal
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - 1). Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
  - 1). Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah
  - 2). Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

- 3). Optimalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya
  - 4). Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan
  - 5). Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 6). Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - 7). Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - 8). Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - 9). Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah
  - 10). Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga
  - 11). Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - 12). Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar
8. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
    - 1). Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka pendek dan jangka menengah berdasarkan Rancangan Awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Bone Periode Tahun 2019-2023 serta hasil kajian terhadap isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, ditetapkanlah program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja tujuan/sasaran strategis setiap tahunnya.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone pada Tahun 2019 terdiri dari 8 Program dan 31 Kegiatan, yang terbagi atas 2 Program Prioritas dengan 13 Kegiatan dan 6 Program Pendukung dengan 18 Kegiatan yang kesemuanya difokuskan pada pencapaian target indikator tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, seperti tersaji pada Bab III sebelumnya. Dengan alokasi dana yang dianggarkan melalui program dan kegiatan tersebut sebesar Rp. 6.400.000.000,00 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Bone.

Rencana Program dan kegiatan sebagaimana terlampir pada Tabel T-C.33

**Tabel T-C.33.**

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019  
dan Prakiraan Maju Tahun 2020  
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

Nama Perangkat Daerah : BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan			Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				URUSAN WAJIB							
1	20			OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH,			6.400.000.000				7.380.278.400
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Ketersediaan pelayanan administrasi perkantoran	Bapenda	100%	891.453.000	APBD	100%	975.000.000
1	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Pembayaran Telepon dan listrik	Kantor Bapenda	12 paket	55.000.000	APBD	12 paket	55.000.000
1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Jasa Belanja Jasa upah tenaga kerja	Kantor Bapenda	12 paket	362.568.000	APBD	12 paket	371.000.000
1	20	01	13	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kantor Bapenda	15 Jenis	8.895.000	APBD	15 Jenis	9.000.000
1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Peundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Majalah Untuk Peningkatan wawasan aparatur sipil negara	Kantor Bapenda	12 Paket	40.000.000	APBD	12 Paket	40.000.000
1	20	01	23	Rapat-rapat Kordinas dan Konsultasi Dalam Daerah dan Luar Daerah	Jumah Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi Rapat Luar Daerah	Kantor Bapenda	130 Kegiatan	195.000.000	APBD	130 Kegiatan	200.000.000
1	20	01	24	Pelaksanaan Adminitrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Barang Cetak & Pengandaan	Kantor Bapenda	12 Paket	229.990.000	APBD	12 Paket	300.000.000
1	20	02		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana & prasarana aparatur sesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran	Kantor Bapenda	100%	832.805.000		100%	988.000.000



Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas/Operasional	Kantor Bapenda	1 Unit	430.000.000	APBD		2 Unit	450.000.000
1	20	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Kantor	Kantor Bapenda	4 Jenis	33.000.000	APBD		4 Jenis	38.000.000
1	20	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan kantor	Kantor Bapenda	4 Jenis	61.500.000	APBD		4 Jenis	90.000.000
1	20	02	10	Pengadaan Mabeleur	Jumlah Mabeleur Kantor	Kantor Bapenda	27 Buah	27.500.000	APBD		30 Buah	40.000.000
1	20	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	3 Paket	125.805.000	APBD		3 Paket	150.000.000
1	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan dibayarkan pajak tahunan (STNK) secara rutin selama satu tahun anggaran	Kantor Bapenda	35 Unit	135.000.000	APBD		40 Unit	180.000.000
1	20	02	26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Penyediaan Pemeliharaan Rutin Perlengkapan Gedung Kantor	Kantor Bapenda	49 Unit	20.000.000	APBD		55 Unit	40.000.000
1	20	03		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Cakupan realisasi pengadaan kebutuhan penunjang disiplin aparatursesuai rencana kebutuhan setiap tahun anggaran</b>	Kantor Bapenda	<b>100%</b>	<b>40.500.000</b>	APBD		<b>100%</b>	<b>45.000.000</b>
1	20	03	06	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas ASN	Kantor Bapenda	150 Pasang	40.500.000	APBD		160 Pasang	45.000.000
1	20	05		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Cakupan Realisasi Jumlah ASN yang mengikuti diklat dan pelatihan</b>	Kantor Bapenda	<b>100%</b>	<b>230.000.000</b>			<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>
1	20	05	01	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti bimtek, pendidikan dan pelatihan	Kantor Bapenda	12 Paket	230.000.000	APBD		12 Paket	250.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan realisasi penyusunan dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan setiap tahun anggaran	Kantor Bapenda	100%	9.821.000	APBD		100%	10.000.000
1	20	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD dan Evaluasi Renja (Rencana Kerja)	Kantor Bapenda	3 dokumen	9.821.000	APBD		3 Dokumen	10.000.000
				Program Peunjang Pemerintahan Umum	Cakupan realisasi kegiatan penunjang pemerintahan umum setiap tahun anggaran	Kantor Bapenda	100%	82.850.000			100%	95.000.000
1	20	06	01	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja dan RKA yang tersusun	Kantor Bapenda	3 dokumen	46.850.000	APBD		3 dokumen	55.000.000
1	20	08	03	Promosi dan Pameran Pembangunan	Jumlah Pelaksanaan Pameran Pembangunan	Kantor Bapenda	1 Kegiatan	36.000.000	APBD		1 Kegiatan	40.000.000
1	20	17		Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi PAD terhadap pencapaian target	Kantor Bapenda	100%	3.644.208.000			100%	6.054.224.400
1	20	17	19	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah	Jumlah jenis kegiatan Intensifikasi & Ekstensifikasi PAD	Kantor Bapenda	3 Kegiatan	698.327.000	APBD		3 Kegiatan	760.627.000
1	20	17	70	Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Pelayanan Kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Kantor Bapenda	6 Pelayanan	485.370.000	APBD		6 Pelayanan	560.225.000
1	20	17	71	Optmalisasi Penagihan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Lainnya	Jumlah Jenis Kegiatan Penagihan	27 kecamatan di kabupaten Bone	8 Jenis Pajak & Retribusi Daerah	100.074.000	APBD		74.334.681.468	150.732.400
1	20	17	72	Pemutakhiran Data Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Jumlah Pemutakhiran Data PBB-P2	Kec. Tanete Riatang, Kec. Tellu Siattinge	2 Paket	426.789.000	APBD		2 Paket	856.000.000
1	20	17	73	Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola pendataanya secara berkala	Kantor Bapenda	750 WP& WR	92.835.000	APBD		800 WP& WR	130.315.000
1	20	17	74	Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kantor Bapenda	5 Dokumen	121.692.000	APBD		5 Dokumen	150.657.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	20	17	75	Operasional Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah penerima jasa administrasi pemungutan bagi kolektor dan kepala desa selaku pelaksana penagihan PBB-P2	Kantor Bapenda	504 OB	1.267.954.000	APBD		504 OB	2.079.609.000
1	20	17	80	Penerbitan dan Distribusi Dokumen Ketetapan PBB-P2	Jumlah dokumen penerbitan dan distribusi SPPT, STTS dan DHKP	Kantor Bapenda	3 dokumen	305.196.000	APBD		3 dokumen	340.000.000
1	20	17	84	Optimalisasi Penerimaan Retribusi Pasar	Jumlah pasar yang dioptimalkan pemungutan retribusi nya	Kantor Bapenda	83 Pasar	145.971.000	APBD		83 Pasar	170.131.000
					<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Pengelolaan PAD yang harus tersusun setiap tahun</b>	<b>Kantor Bapenda</b>	<b>100%</b>	<b>501.383.000</b>	<b>APBD</b>		<b>100%</b>	<b>855.928.000</b>
1	20	17	76	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan	Jumlah Dokumen Penerimaan PBB-P2	Kantor Bapenda	4 Dokumen	79.618.000	APBD		5 Dokumen	155.000.000
1	20	17	77	Penatausahaan Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah	Kantor Bapenda	6 Dokumen	55.643.000	APBD		6 Dokumen	124.000.000
1	20	17	78	Penyusunan Laporan Pendapatan Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga	Jumlah Dokumen Laporan Pendapatan Daerah dan Laporan Pendapatan Benda Berharga	Kantor Bapenda	10 Dokumen	366.122.000	APBD		10 Dokumen	576.928.000
<b>1</b>	<b>20</b>	<b>26</b>		<b>Program Penataan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>Persentase Kenaikan Objek Pajak Daerah Setiap Tahun</b>	<b>Kab. Bone</b>	<b>0,16</b>	<b>166.980.000</b>	<b>APBD</b>		<b>0,18</b>	<b>201.054.000</b>
1	20	26	08	Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Kecamatan Tanete Riattang	150 Orang	166.980.000	APBD		150 Orang	201.054.000

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2019 di Lingkup Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone. Dengan dirumuskannya Rencana kerja Tahun 2019, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa yang akan datang melalui upaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan kerjasama yang harmonis dengan seluruh Stakeholder terkait dalam mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 ini dapat dijadikan acuan dalam bagi seluruh pemangku kepentingan , sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2019.

**Watampone, 1 Agustus 2018**



**KEPALA BAPENDA KAB. BONE**

**A. HERMAN, SH, MH**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**N I P : 19620724 199003 1 008**